Jurnal Pelangi

Website: ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/pelangi

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Jolianis

STKIP PGRI Sumatera Barat

joulianiskoto@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima :01-01-2014

Disetujui :01-12-2014

Kata Kunci:

***Dana Alokasi Umum (Dau),
Pendapatan Asli Daerah (Pad),
Belanja Daerah***

Keywords:

***General Allocation Fund,
local revenue
against Expenditure***

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris : 1) Pengaruh dan alokasi umum terhadap belanja daerah. 2) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Penelitian ini menemukan bahwa : 1) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan jumlah Dana alokasi Umum akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Abstract

This study is to demonstrate empirically: 1) The effect of the General Allocation Fund to Expenditure. 2) The effect of local revenue against Expenditure. This study found that: 1) General Allocation Fund has a significant effect on local spending. Increasing the amount of General Fund allocation will result in an increase in the number of Expenditure to be incurred by the local government. 2) the original income significantly influence the shopping area. Increasing the amount of the original income will result in an increase in the number of Expenditure to be incurred by the local government

PENDAHULUAN

Respons tiap-tiap pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat terhadap dana transfer yang

diberikan oleh pemerintah pusat berbeda-beda. Tidak semua daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki kesiapan

dalam menerima dana transfer tersebut. Dampaknya adalah terjadi perilaku yang tidak simetris sebagai respon terhadap dana transfer yang diberikan. Ketika pemerintah pusat memberikan bantuan transfer kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan belanja daerah, terdapat indikasi respon yang asimetris terhadap bantuan tersebut. Transfer pemerintah pusat tentunya berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada saat pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat menerima transfer dari pemerintah pusat dana itu digunakan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan PAD tiap-tiap daerah.

Peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan adanya indikasi bahwa peningkatan belanja yang tinggi tersebut dikarenakan inefisiensi belanja pemerintah, terutama belanja operasional. Selain itu pada saat transfer dana dari pemerintah pusat menurun maka juga diikuti oleh penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan PAD. Kecenderungan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi, sehingga dalam jangka panjang ketergantungan ini seharusnya dikurangi, karena akan berdampak negative pada kemandirian daerah. Saat masyarakat

(pemerintah daerah) menerima transfer maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah dan peningkatan konsumsi barang publik. Hal ini menunjukkan bahwa transfer meningkatkan konsumsi akan barang public namun tidak menjadi substitute pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan Provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan terhadap transfer pemerintah pusat. Selanjutnya juga terlihat belanja daerah setiap tahunnya jauh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentunya hal ini juga memperkuat alasan bahwa Provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan sangat mengharapkan transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi belanja daerah setiap tahunnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber pembiayaan daerah in masih mengharapkan transfer dari pemerintah pusat, karena objek pajak dan retribusi daerah yang ada sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu

menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Di saat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka Pemerintah Daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Proporsi DAU yang digunakan untuk menutupi belanja daerah pada Provinsi Sumatera Barat relative tinggi dibandingkan dengan penggunaan PAD. Artinya, pemerintah daerah lebih mengandalkan dana alokasi umum untuk keperluan belanja daerah sehingga hal ini mengindikasikan terjadinya *flypaper effect* pada keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dalam menghadapi permasalahan ini tentunya diperlukan upaya khusus untuk mengatasi agar pemerintah daerah tidak selalu bergantung kepada dana alokasi umum untuk menutupi belanja daerah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)?

METODE PENELITIAN

1. Model Tahapan Penelitian

- a. Mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder maka langkah pertama peneliti akan mengumpulkan data berbentuk data pool times series berupa selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2008 – 2012.
- b. Mengolah data
- c. Menganalisis data

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 19 Kabupaten/Kota. Waktu penelitian direncanakan pada tahun 2014.

3. Peubah yang diamati/diukur

a. Variabel Terikat (Dependent Variabel).

Belanja Daerah secara keseluruhan (Y) yang disingkat dengan BD merupakan semua pengeluaran dari rekening kasumum daerah yang mengurangi iekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah dalam satu periode.

b. Variabel Bebas (Independent Variabel)

1) Dana Alokasi Umum (X1) yang disingkat

dengan DAU merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- 2) **Pendapatan Asli Daerah (X2)** yang disingkat dengan PAD merupakan Pendapatan Asli Daerah adalah total pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang berasal Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain pendapatan. Data pendapatan asli daerah pada penelitian diukur dalam satuan rupiah

4. Model yang digunakan

$$Y = a + b_1 \text{ DAU}_i + b_2 \text{ PAD}_i + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah (BD)

a = Konstanta

b₁ b₂ = Koefisien Regresi

DAU = Jumlah DAU

PAD = Jumlah PAD

e = error term

5. Teknik Analisis Data

a. Pengujian Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan maksud memeriksa apakah data yang berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Menurut Santoso (2002) pedoman yang dipakai dalam uji normalitas ini adalah menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yaitu :

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari alpha ($\alpha = 0,05$) maka distribusi data adalah normal
2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari alpha ($\alpha = 0,05$) maka distribusi data adalah tidak normal.

2) Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan bantuan software SPSS. Menurut Gujarati (2003) untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dilakukan dengan rumus : $VIF =$

$$\frac{1}{(1 - r^2 \beta_{ij})}$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai $VIF > 10$, berarti terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas, maka terdapat multikolinieritas pada tingkat kepercayaan 95%
- b) Jika nilai $VIF < 10$, berarti tidak terdapat multikolinieritas pada tingkat kepercayaan 95%.

3) Uji Autokorelasi

Dalam studi ini akan digunakan uji Durbin Watson (DW) karena nilai statistik DW biasanya selalu muncul dalam setiap hasil regresi menggunakan Eviews. Adapun kaidah atau ketentuan penerimaan Durbin Watson adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003);

- $DW < dl$ = terdapat autokorelasi positif
- $dl < DW < du$ = daerah keragu-raguan/tidak dapat disimpulkan
- $du < DW < 4-du$ $DW =$ Tidak ada autokorelasi

Homokedastisitas. Sedangkan jika varians berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Sedangkan model regresi yang baik adalah jika tidak terjadinya heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji Gletser. Dalam uji ini apabila hasilnya $Sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. (Ghozali, 2005).

b. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi linear berganda (*multiple regression*). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk pengujian pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun persamaan

- $4-du < DW < 4-dl$ = daerah keragu-raguan/tidak dapat disimpulkan
- $DW > 4-dl$ = terdapat autokorelasi negatif

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu persamaan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dari hipotesis 3 adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 DAU_{1i} + b_2 PAD_{2i} + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah (BD)

a = Konstanta

$b_1 b_2$ = Koefisien Regresi

DAU = Jumlah DAU

PAD = Jumlah PAD

e = error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara deskriptif variabel penelitian. Statistik deskriptif dari data masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif (Juta Rupiah)

Statistics		BD	DAU	PAD
N	Valid Missing	95 0	95 0	95 0
Mean		518895.9684	327919.2526	29290.3789
Median		478137.0000	297522.0000	22176.0000
Mode		190270.00 ^a	187600.00 ^a	20005.00 ^a
Std. Deviation		213748.19824	112785.67132	29194.68847
Variance		45688292251	12720607654	852329834.7
Range		1209942.00	515516.00	194092.00
Minimum		190270.00	187600.00	8873.00
Maximum		1400212.00	703116.00	202965.00
Sum		49295117.00	31152329.00	2782586.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Dari hasil pengolahan data terlihat nilai statistik dari masing-masing variabel penelitian, dimana untuk variabel belanja daerah terlihat bahwa nilai terendah adalah sebesar 190.270 dan nilai tertinggi adalah sebesar 1.400.212 dan nilai rata-rata adalah 518.896,97 dengan standar deviasi sebesar 213.748,19. Jadi terlihat bahwa nilai rata-rata belanja daerah lebih besar jika dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini menunjukkan belanja daerah adalah valid dan bagus.

Variabel dana alokasi umum mempunyai nilai terendah sebesar 187.600 dan nilai tertinggi adalah sebesar 703.116 dan nilai rata-rata adalah sebesar 327.919,25 dengan standar deviasi sebesar 112.785,67. Maka tergambar bahwa nilai rata-rata dana alokasi umum lebih besar jika dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini menunjukkan dana

alokasi umum adalah valid dan bagus.

Variabel pendapatan asli daerah mempunyai nilai terendah sebesar 8.873 dan nilai tertinggi adalah sebesar 202.965 dan nilai rata-rata adalah sebesar 29.290,38 dengan standar deviasi sebesar 29194,69. Maka tergambar bahwa nilai rata-rata pendapatan asli daerah lebih besar jika dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini menunjukkan pendapatan asli daerah adalah valid dan bagus.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan penduga koefisien regresi yang mempunyai error terkecil atau model regresi yang dihasilkan adalah mempunyai sifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimate*) atau mempunyai sifat yang linear, tidak bias dan varian minimum.

a. Uji Normalitas

Pengujian terhadap normalitas data ini dilakukan untuk mengetahui apakah data mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Model regresi

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Berdasarkan hasil analisis data terhadap pengujian normalitas disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		77253.78199
Most Extreme Differences	Absolute		.065
	Positive		.042
	Negative		-.065
Kolmogorov-Smirnov Z			.635
Asymp. Sig. (2-tailed)			.815

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel di atas terlihat semua variable residual memiliki nilai signifikansi sebesar 0,815 yaitu lebih besar dari alpha ($0,815 > 0,05$). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data hasil penelitian sudah berdistribusi normal sehingga analisis regresi dapat dilaksanakan.

b. Uji Multikolinearitas

Salah satu syarat untuk memakai analisis dengan menggunakan regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan uji *multicolinearitas* yaitu uji hubungan

sesama variabel bebas. Multikolineritas adalah keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) yang erat satu sama lain (Gujarati, 2003). Analisis ini bertujuan untuk melihat korelasi sesama variabel bebas. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas maka salah satu diantaranya dieleminir atau dikeluarkan dari model regresi berganda.

Hasil uji multikolineritas data hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DAU	.588	1.701
	PAD	.588	1.701

a. Dependent Variable: BD

Berdasarkan hasil analisis data untuk uji multikolinearitas sebagaimana pada di atas maka diketahui nilai tolerance masing-masing variabel bebas adalah 0,588 dan nilai VIF sebesar 1,701. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel bebas adalah lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesama variabel bebas tidak memiliki hubungan yang kuat satu sama lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data hasil penelitian ini tidak mengalami kasus multikolinearitas, artinya bahwa sesama variabel bebas tidak berkorelasi kuat satu sama lainnya sehingga analisis regresi linear berganda dapat dilakukan karena tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu persamaan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Sedangkan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Sedangkan model regresi yang baik adalah jika tidak terjadinya heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *Glejser*. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

o	Variabel	ig	lpa	A	Keterangan
	Dana Alokasi Umum	,194	,05	0	Tidak heteroskedastisitas
	Pendapatan Asli Daerah	,208	,05	0	Tidak heteroskedastisitas

Dari Tabel 5 terlihat bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikan dari semua

variabel bebas lebih besar dari alpha (0,05). Dengan demikian analisis regresi dapat dilakukan

karena tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson
1	1.767

Dari hasil uji tabel 4.6 terlihat bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1.948004. Nilai ini terletak antara -2 dengan +2 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi.

A. Pengujian Hipotesis

Berikut disajikan hasil pengujian masing-masing

Pengujian autokorelasi ini dengan menggunakan *Durbin Watson* dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai *Durbin Watson* antara -2 dan +2 maka tidak terjadi autokorelasi diperoleh nilai *Durbin Watson* pada tabel 6

hipotesis yang diuji dalam penelitian ini disertai pembahasan masing-masing hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis pada penelitian adalah untuk menguji ada tidaknya pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah (BD). Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

No	Variabel	Notasi	Koefisien	t hitung	Prob	Ket
	Konstanta	a	17.746,2			
	Dana Alokasi Umum	X1	1,511	16,220	0.00	Signifikan
	Pendapatan Asli Daerah	X2	1,409	3,917	0.00	Signifikan
R Square = 0,869 F Hitung = 306,416 F Prob. = 0,000						

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai konstanta sebesar 17.746,2 dan nilai koefisien regresi dari dana alokasi umum (DAU) adalah sebesar 1,511. Berdasarkan hasil analisis

data dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 17.746,2 + 1,511X_1 + 1,409X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 17.746,2 menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah tanpa dipengaruhi oleh DAU dan PAD adalah sebesar 17,746 milyar
2. Nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 1,515, nilai t hitung 16,220 serta nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0.05$. Hal ini berarti hipotesis pertama yang menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah dapat **diterima**. Koefisien variabel dana alokasi umum bernilai positif, ini menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan jumlah dana alokasi umum akan terjadi juga peningkatan pada jumlah belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 1,409, nilai t hitung 3,917 serta nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0.05$. Hal ini berarti hipotesis kedua yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah dapat **diterima**. Koefisien variabel pendapatan asli daerah bernilai positif ini menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan pendapatan asli daerah akan terjadi juga peningkatan pada jumlah belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jika terjadi peningkatan jumlah dana alokasi umum akan terjadi juga peningkatan pada jumlah belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan penyanggah utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketergantungan daerah pada pemerintah pusat tidak

berarti bahwa daerah kurang berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau karena potensi pendapatan yang ada di daerah sangat terbatas.

Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Halim (2004) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota

2. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jika terjadi peningkatan jumlah dana alokasi umum akan terjadi juga peningkatan pada jumlah belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Jika ada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian ini berarti pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat telah mampu menggali potensi sumber-sumber keuangannya berupa pendapatan asli daerah dan menggunakannya untuk membiayai belanja daerahnya. Pemerintah daerah selain bergantung pada pemerintah pusat berupa transfer dana perimbangan dari pusat dalam membiayai belanja daerahnya, mereka juga bisa mendanai belanja daerahnya dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah dapat berasal dari Pajak Daerah, merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Retribusi Daerah, merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Halim (2004) menegaskan bahwa Belanja daerah akan ditentukan oleh Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya memberikan dampak positif terhadap peningkatan Belanja Daerah (BD). Apabila pemerintah daerah dapat menutupi segala kebutuhan belanja daerah dengan pendapatan sendiri tentunya menandakan tingginya tingkat kemandirian daerah dalam menjalani otonomi daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan jumlah Dana alokasi Umum (DAU) akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

1. Implikasi Penelitian

a. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pembaca untuk memahami lebih mendalam tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah.

b. Implikasi Praktis

Dari hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa dalam mengamati belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat maka dapat dirumuskan implikasi kebijakan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah daerah diharapkan untuk mempedomani hasil penelitian ini dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan membiayai belanja daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam membiayai belanja daerah.
3. Dalam rangka otonomi daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat masih tergantung pada transfer dari pusat.
4. Bagi akademis hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi tentang sumber keuangan daerah dan alokasi pembiayaan belanja.

c. Keterbatasan Penelitian dan Saran

Adapun keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya adalah :

1. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat disarankan untuk penelitian berikutnya agar menggunakan sampel yang lebih banyak dengan periode pengamatan yang panjang agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.
2. Model analisis yang digunakan pada penelitian adalah regresi linear sederhana dan regresi linear berganda serta uji beda, disarankan disarankan untuk menggunakan model yang lain agar dapat mengeneralisir hasil penelitian lebih komprehensif seperti halnya menggunakan analisis faktor, *structure equation model* (SEM).
3. Belum dapat tergambar dengan baiknya proksi perilaku pengalokasian sumber daya oleh pengelola keuangan daerah dan politisi dikarenakan penggunaan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD. Dibutuhkan pendekatan lain yang lebih feasible, misalnya dengan melakukan *field research* atau eksperimen (dengan subjek eksekutif dan legislative daerah).
4. Variabel yang diteliti hanya menggunakan dua variabel yang mempengaruhi Belanja Daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga bagi peneliti selanjutnya agar memasukkan variabel-variabel

lain yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah (misalnya Dana Alokasi Khusus, dana hibah, dll).

UCAPAN TERIMAKASIH

Terbitnya tulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pihak STKIP PGRI Sumatera Barat khususnya pengelola jurnal Pelangi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis di jurnal Pelangi. Selanjutnya penulis juga berterima kasih kepada para penyumbang sumber inspirasi yang telah memberikan inspirasi bagi penulis untuk mengutip atau menggunakan tulisannya sebagai bahan referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul. 2003. *Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa-Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta.
- Adi, P.H. 2005. Implementasi Activity Based Costing Terhadap Kinerja Perusahaan, *Jurnal. Ekonomi dan Bisnis*, XI (2), 101-118, Maret 2005
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar : Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga
- Kusuma, Dewi dan Arief Rahman. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

- terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Indonesia, *JAAI* Volume 11 No.1, Juni 2007.
- Maimunah, Mutiara. 2006 : Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, *Simposium Nasional Akuntansi 9* Padang, K-ASPP 04.
- Maimunah, Mutiara dan Akbar Rusdi 2008 : Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.11, No.1, Januari 2008.
- Nachrowi D., dan Hardius Usman, 2006. *Pendekatan Populer dan dan. Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
- , No.59 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah* Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
- Prakosa, Kesit, Bambang, 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (studi empiric di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), *JAAI* Vol.8 No.2, 2004.
- Republik Indonesia 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia* No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- , 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia* No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, CV Alfabeta.
- Thahjanulin, Domai. 2008. Reinventing Keuangan Daerah studi tentang pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol.11 No.02 Maret 2002. [http://www.google.com/reinventing keuangan daerah](http://www.google.com/reinventing%20keuangan%20daerah) accessed on march 20.2008.
- Undang-undang* Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- , Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

-----, Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi
Daerah.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan
Keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah Indonesia*,
RajaGrafindo persada.

Zampelli, Ernest M.1986. resource
fungibility,the flypaper effect,
and the Expenditure impact of
grants-in-aid. *The Review of
economics and Statistic* 67;33-
40.